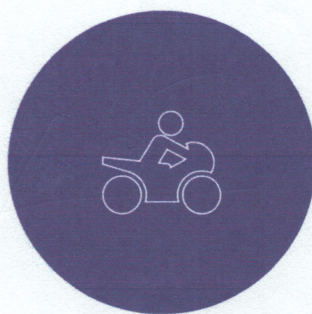




PERJANJIAN **KINERJA**
2018



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018 merupakan pernyataan perjanjian kinerja yang digunakan dalam mengelola dan meningkatkan kinerja unit organisasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para *stakeholder* dalam tataran tata kelola Pemerintahan yang baik. Dalam Perjanjian Kinerja dimaksud, memuat target kinerja yang hendak dicapai dalam Tahun 2018 yang menjadi tolak ukur akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada akhir tahun 2018.

Perjanjian kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Akhir kata, kiranya Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan pembangunan demi menuju terwujudnya sistem Pemerintahan yang baik.

Jakarta, 18 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

Pembina Utama (IV/e)

NRP. 6205 0784



PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2018

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN R.I.**

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TAHUN 2018**

**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 18 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Darat yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah Dalam Rangka Mewujudkan Konektivitas Nasional dan Peningkatan Angkutan Perkotaan	1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	Rasio	0,675
			2 Jumlah trayek keperintisan angkutan jalan	Trayek	296
			3 Jumlah lintas angkutan penyeberangan perintis	Lintas	222
			4 Jumlah lintas angkutan penyeberangan komersil	Lintas	61
			5 Terhubungnya sabuk lintas penyeberangan	%	97
2	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	6 Jumlah Pedoman Standar Keselamatan Transportasi Darat	Dokumen	4
			7 Jumlah sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat		
			a. Jumlah Marka Jalan	m ²	1.696.647
			b. Jumlah Rambu Lalu Lintas	Unit	23.362
			c. Jumlah APILL	Unit	20
			d. Jumlah Penerangan Jalan Umum	Unit	5.592
			e. Jumlah Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan (Fasilitas UPPKB)	Unit	10
			f. Jumlah Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (guard rail)	m'	19.377
			g. Jumlah SBNP	Unit	3
			h. Jumlah Rambu Sungai	Unit	85
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	8 Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat	Dokumen	4
			9 Jumlah frekuensi pelayanan pada lintas penyeberangan	trip	532.000
			10 Persentase sarana pelayanan AKAP yang memenuhi SPM	%	90
			11 Persentase pemenuhan standar operasional pelabuhan penyeberangan lintas utama	%	100
			12 Persentase kapal penyeberangan pada lintas utama yang memenuhi SPM	%	100
			13 Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal Perkotaan	%	82,69
			14 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Darat	%	83,24
			15 Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca dari Sektor Transportasi Darat	%	26,00
			16 Jumlah kota yang menerapkan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh Ibukota Provinsi/ Kota Besar/ Kota Metropolitan	Lokasi	15
			17 Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan		5.595
			a. Penerangan Jalan Umum Listrik yang dilengkapi dengan sensor	Unit	5.592
			b. SBNP	Unit	3

NO	SASARAN KEMENTERIAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	
4	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	18 Persentase Peningkatan Kapasitas Prasarana Transportasi Darat	%	37,66
			19 Persentase Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Darat	%	20,63
5	Meningkatnya Layanan Transportasi di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Meningkatnya Layanan Transportasi Darat di Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	20 Rasio Layanan Transportasi Darat pada Daerah Rawan Bencana, Perbatasan, Terluar dan Terpencil	Rasio	0,49
6	Tersedianya SDM Transportasi yang Kompeten dan Profesional	Tersedianya SDM Transportasi Darat yang Kompeten dan Profesional	21 Jumlah pemberian sertifikat dan kualifikasi teknis petugas operasional	Sertifikat	350
			22 Jumlah Pegawai yang sudah memiliki sertifikat	Orang	750
7	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Kementerian Perhubungan	Terwujudnya Good Governance & Clean Government di Sub Sektor Perhubungan Darat	23 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Nilai	85
			24 Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Perhubungan Darat	%	90
			25 Nilai aset Ditjen Perhubungan Darat yang berhasil diinventarisasi	Rp	18.000.000.000.000

KEGIATAN	ANGGARAN	
1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat	Rp	293.287.111,00
2 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat	Rp	944.308.869,00
3 Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Rp	763.995.278,00
4 Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda	Rp	1.250.065.502,00
5 Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan	Rp	137.488.544,00
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubdat	Rp	1.192.862.382,00
TOTAL	Rp	4.582.007.686,00

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

Jakarta, 18 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.SI